



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9404-9412

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia: A Systematic Literature Review

Adinda Putri Pawan<sup>1</sup>, Muhammad Irvan Nur Iva<sup>2\*</sup>, Rahayu<sup>3</sup>, Herman H<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, Makassar

<sup>1</sup>[adindaalison@gmail.com](mailto:adindaalison@gmail.com), <sup>2</sup>[muh.irvan.nuriva@unm.ac.id](mailto:muh.irvan.nuriva@unm.ac.id), <sup>3</sup>[rahayu@unm.ac.id](mailto:rahayu@unm.ac.id), <sup>4</sup>[hermandody@unm.ac.id](mailto:hermandody@unm.ac.id)

### Abstrak

Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan penting dalam implementasi kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Pemerintah tidak lagi dapat bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik, sehingga diperlukan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi lintas sektor, faktor pendukung keberhasilan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, SINTA, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan collaborative governance dan kolaborasi kebijakan publik di Indonesia. Berdasarkan proses seleksi literatur, diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia umumnya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pola kerja sama multi-stakeholder collaboration. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antar aktor, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Namun demikian, implementasi kolaborasi lintas sektor masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan di Indonesia.

*Kata kunci:* Kolaborasi Lintas Sektor, Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Systematic Literature Review, Tata Kelola Pemerintahan.

### 1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik di Indonesia pada era modern menghadapi tantangan kompleksitas yang semakin meningkat, terutama ketika isu yang dihadapi bersifat lintas sektoral. Masalah seperti pengentasan kemiskinan (Ishaq Yunus, 2022), penanggulangan stunting (Dinarwati & Nurfadilah, 2025), hingga mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan (Bustari et al., 2009; Artha et al., 2023) menuntut respons yang tidak lagi bersifat parsial. Paradigma administrasi publik saat ini menuntut pergeseran dari pendekatan birokrasi tradisional menuju model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), di mana aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dituntut untuk bersinergi (Nurhayati & Rahman, 2023).

Secara teoretis, *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif (Ansell & Gash, 2008). Proses ini melibatkan siklus berkelanjutan yang mencakup pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor masih sering terjebak dalam sekat-sekat administratif (*ego sektoral*). Berbagai studi kasus menunjukkan adanya ketimpangan antara desain kebijakan yang

partisipatif dengan praktik implementasi. Sebagai contoh, evaluasi inovasi program "Membangun Bangun Rakyat" (MEMBARA) di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi telah diupayakan, dominasi pemerintah daerah dalam perencanaan masih sangat kental, sementara keterlibatan aktor non-pemerintah cenderung terbatas pada aspek finansial (Askary et al., 2022). Fenomena serupa juga ditemukan pada implementasi kebijakan kesehatan dan lingkungan di berbagai daerah, di mana rendahnya koordinasi dan keterbatasan partisipasi aktif masyarakat menjadi penghambat utama keberhasilan tujuan kebijakan (Puby et al., 2025; Saputra et al., 2025).

Kesenjangan (*gap*) antara idealisme tata kelola kolaboratif dengan realitas implementasi ini menuntut refleksi mendalam mengenai model dan *best practices* yang relevan dengan konteks Indonesia. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kolaborasi lintas sektor, sebagian besar literatur masih bersifat parsial pada studi kasus tertentu. Belum banyak upaya untuk mensintesis pembelajaran dari berbagai lokus penelitian tersebut untuk ditarik menjadi kerangka yang lebih luas bagi praktisi kebijakan.

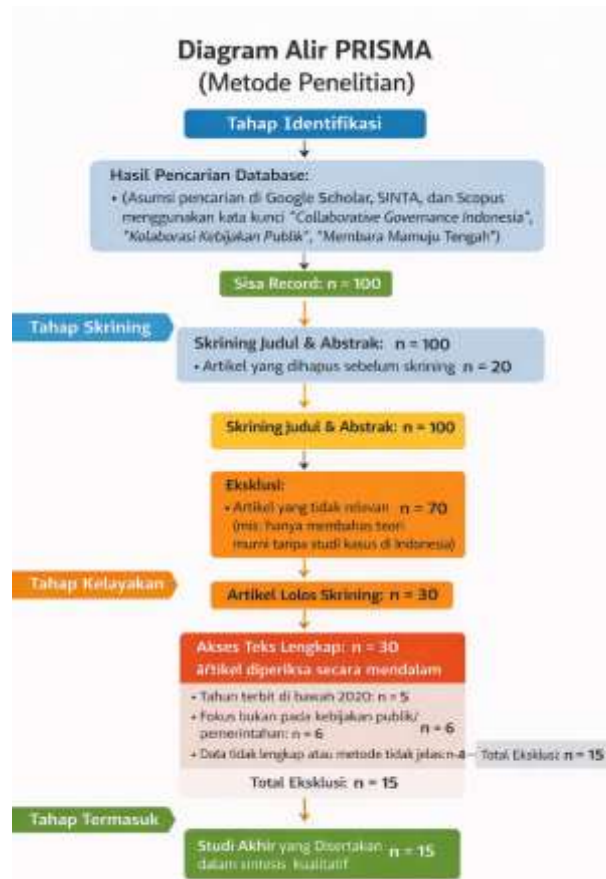
Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis protokol PRISMA 2020, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana tren dan bentuk kolaborasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia?; (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat utama dalam kolaborasi tersebut?; dan (3) Model seperti apa yang paling efektif untuk diterapkan dalam konteks daerah di Indonesia?

Melalui tinjauan sistematis terhadap 15 artikel kunci, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur administrasi publik mengenai tata kelola kolaboratif, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang mekanisme kolaborasi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu yang membahas kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pemetaan pengetahuan secara sistematis dan terstruktur terhadap penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan publik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan empiris dari beragam studi sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai pola kolaborasi, faktor pendukung, serta tantangan implementasi kebijakan berbasis kolaborasi di Indonesia.

Prosedur penelitian dalam artikel ini mengacu pada kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis* (PRISMA) yang umum digunakan dalam penelitian tinjauan sistematis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi proses seleksi literatur (Moher et al., 2009; Wijayanto et al., 2020). Model PRISMA digunakan untuk menggambarkan tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga pemilihan akhir artikel yang akan dianalisis. Penggunaan kerangka ini membantu peneliti memastikan bahwa proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Alur proses penelitian tersebut digambarkan dalam Diagram Alir PRISMA pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir PRISMA

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi literatur. Pada tahap ini dilakukan proses pencarian artikel ilmiah yang relevan melalui beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, SINTA, DOAJ, serta beberapa portal jurnal perguruan tinggi yang telah mempublikasikan artikel terkait topik kebijakan publik dan kolaborasi lintas sektor. Pemilihan beberapa basis data tersebut bertujuan untuk memperoleh cakupan literatur yang lebih luas baik dari jurnal nasional maupun internasional. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain *kolaborasi lintas sektor*, *collaborative governance*, *implementasi kebijakan publik*, serta *Mamuju Tengah*. Penggunaan kombinasi kata kunci tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan artikel yang berkaitan dengan praktik kolaborasi dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia.

Tahap kedua adalah *screening*, yaitu proses penyaringan awal terhadap artikel yang telah ditemukan pada tahap identifikasi. Pada tahap ini dilakukan peninjauan judul dan abstrak artikel untuk mengetahui kesesuaian topik penelitian dengan fokus kajian dalam artikel ini. Artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kolaborasi lintas sektor atau tidak membahas implementasi kebijakan publik dieliminasi dari proses seleksi. Selain itu, artikel yang bersifat opini, editorial, atau tidak memiliki struktur penelitian yang jelas juga tidak dimasukkan dalam tahap analisis selanjutnya. Proses *screening* ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan memiliki kualitas akademik yang memadai yang akan dianalisis lebih lanjut.

Tahap ketiga adalah *eligibility* atau penilaian kelayakan. Pada tahap ini artikel yang telah lolos proses *screening* dianalisis secara lebih mendalam dengan membaca keseluruhan isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria inklusi digunakan dalam tahap ini, yaitu: (1) artikel membahas kolaborasi lintas sektor atau *collaborative governance* dalam konteks implementasi kebijakan publik; (2) penelitian dilakukan pada lokus Indonesia; (3) artikel merupakan penelitian empiris atau kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik; dan (4) artikel dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 2020–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan kajian terbaru. Artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dimasukkan dalam tahap analisis lebih lanjut. Proses ini penting untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis

benar-benar relevan dengan fokus penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik.

Tahap terakhir adalah *included* atau tahap disertakan. Pada tahap ini artikel yang memenuhi seluruh kriteria seleksi dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Artikel yang telah lolos tahap kelayakan kemudian dianalisis dengan menelaah berbagai komponen penting penelitian, seperti tujuan penelitian, metode yang digunakan, lokasi penelitian, serta temuan utama yang berkaitan dengan praktik kolaborasi lintas sektor. Proses analisis dilakukan dengan cara mensintesis temuan-temuan penelitian untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, faktor pendukung keberhasilan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik berbasis kolaborasi. Hasil sintesis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel ringkasan literatur untuk memudahkan pembaca memahami kontribusi masing-masing penelitian terhadap perkembangan kajian *collaborative governance* di Indonesia.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini memperoleh 15 artikel ilmiah yang memenuhi seluruh kriteria seleksi dan selanjutnya digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai sektor kebijakan publik, seperti kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengelolaan lingkungan, serta program pembangunan daerah. Keberagaman sektor tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* berbasis PRISMA, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis pengetahuan yang lebih sistematis mengenai praktik kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan dasar metodologis yang jelas sehingga hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi peneliti maupun praktisi kebijakan dalam mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang lebih efektif di masa mendatang.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui proses *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai sektor kebijakan publik di Indonesia, seperti kesehatan, sosial, lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta mitigasi bencana. Sintesis karakteristik penelitian dan temuan utama dari masing-masing artikel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Systematic Literature Review

No	Penulis & Tahun	Judul Artikel	Lokus & Fokus	Metode	Temuan Utama Terkait Kolaborasi
1	Paisal Anwar, et al. (2023)	<i>Managing Goal In Collaborative Management: A Case Study In Policy Implementation of MEMBARA</i>	Kab. Mamuju Tengah (Program MEMBARA)	Kualitatif	Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kesamaan tujuan ( <i>goal alignment</i> ) antar pemangku kepentingan dalam penyediaan rumah layak huni.
2	Askary, Alwi, & G. Susanti (2022)	<i>Collaborative Innovation pada Birokrasi Publik di Kabupaten Mamuju Tengah: Studi Kasus Program MEMBARA</i>	Kab. Mamuju Tengah (Inovasi Birokrasi)	Studi Kasus / Kualitatif	Kolaborasi belum optimal karena dominasi pemerintah daerah dalam perencanaan, sementara pihak swasta hanya terlibat pada aspek pendanaan (CSR).
3	Sri Dinarwati & Y.M.	<i>Analisis Efektivitas Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mendukung</i>	Kab. Subang (Sektor Kesehatan)	Kualitatif Deskriptif	Hambatan utama kolaborasi adalah lemahnya koordinasi rutin, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya

	Nurfadilah (2025)	<i>Program Penanganan Stunting</i>			partisipasi masyarakat sasaran.
4	Trio Saputra, et al. (2025)	<i>Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan HIV/AIDS: Studi Collaborative Governance di Kota Pekanbaru</i>	Kota Pekanbaru (Sektor Kesehatan)	Kualitatif	Menekankan pentingnya model <i>collaborative governance</i> untuk menangani isu kesehatan kompleks yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendirian.
5	Maurend Yayank Lewinsca (2025)	<i>Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi Integrated Vector Management (IVM) untuk Eliminasi Malaria</i>	Kab. Muara Enim (Sektor Kesehatan)	Kualitatif (NVivo 12 Pro)	Keberhasilan eliminasi malaria sangat bergantung pada integrasi peran dinas kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa dalam pengendalian vektor.
6	Ryan Puby Sumarta, et al. (2025)	<i>Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program Kali Bersih di Sorong: Penguatan Kesadaran Lingkungan...</i>	Kota Sorong (Sektor Lingkungan)	Kualitatif Deskriptif	Program Prokasih menjadi instrumen kolaborasi untuk membangun kesadaran ekologis melalui keterlibatan berbagai aktor lintas fungsi.
7	Putri Suciana, Usep Dayat, & G. Gumilar (2022)	<i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat</i>	Kab. Bekasi (Sektor Sosial)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi komunikasi dan struktur birokrasi yang jelas sesuai teori Edwards III.
8	Tiara Melati & S. Asmorowati (2023)	<i>Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Publik</i>	Kota Surabaya (Sektor Sosial/BPNT)	Kualitatif Deskriptif	Kebijakan bantuan pangan (BPNT) berfungsi sebagai pendorong inklusi sosial jika mekanisme penyaluran melibatkan pengawasan kolaboratif.
9	Ishaq Yunus (2022)	<i>Analisis Participatory Governance dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus: Institutional Building pada Implementasi Penanggulangan Kemiskinan)</i>	Kab. Mamuju Tengah (Kemiskinan)	Kualitatif (Studi Kasus)	Pentingnya <i>institutional building</i> dan <i>participatory governance</i> dalam mensinergikan aktor publik dan non-publik untuk efektivitas kebijakan sosial.
10	Alfian Deby Artha, et al. (2023)	<i>Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat</i>	Kab. Pasaman Barat (Persampahan)	Kualitatif (Deskriptif)	Inovasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan pemetaan pemangku kepentingan yang jelas serta pembagian peran yang terintegrasi di tingkat lokal (Nagari).

11	Firdha Rahma N., et al. (2021)	<i>Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Jalanan</i>	Kota Semarang (Kesehatan/Sosial)	Kajian Literatur (SLR)	Kolaborasi antar sektor (kesehatan, sosial, dan komunitas) masih terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan kurangnya koordinasi dalam menangani masalah anak jalanan.
12	Azis Bustari, et al. (2009)	<i>Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tamiang</i>	Kab. Aceh Tamiang (Bencana)	Kualitatif (Studi Kasus)	Pertukaran informasi, sumber daya, dan aktivitas antar sektor sangat krusial dalam mitigasi bencana; kepemimpinan memiliki peran vital dalam mengoordinasikan sektor-sektor tersebut.
13	Hesti Rokhaniyah, et al. (2023)	<i>Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (RI-Timor Leste)</i>	Perbatasan RI - Timor Leste (Keamanan & Ekonomi)	Studi Dokumen (Kualitatif)	Kolaborasi diplomasi perbatasan memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi untuk menekan angka penyelundupan lintas negara.
14	Anis Salsabila, Hary Priyanto, & Leni Vitasari (2024)	<i>Kolaborasi Implementasi Program BPNT dalam Penanganan Kemiskinan di Desa Karetan, Banyuwangi</i>	Kab. Banyuwangi (Program BPNT / Sosial)	Deskriptif Kualitatif	Kolaborasi implementasi kebijakan belum maksimal; terdapat ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan sehingga diperlukan perbaikan strategi kolaboratif.
15	Slamet Agus Purwanto, Sumartono, & M. Makmur (2013)	<i>Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kec. Mojosari)</i>	Kab. Mojokerto (Program PKH / Sosial)	Kualitatif (Studi Kasus)	PKH berfungsi sebagai jaminan sosial yang mengintegrasikan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui sistem perlindungan terpadu.

Berdasarkan sintesis literatur yang ditampilkan pada Tabel 1, penelitian mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif telah diterapkan dalam berbagai program pembangunan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor digunakan dalam program pembangunan perumahan, kesehatan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta program perlindungan sosial.

Pada sektor pembangunan daerah, penelitian yang dilakukan oleh Anwar et al. (2023) mengenai implementasi program MEMBARA di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kesamaan tujuan (*goal alignment*) antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Namun demikian, penelitian lain pada program yang sama menunjukkan bahwa kolaborasi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat dominasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, sementara sektor swasta lebih banyak berperan pada aspek pendanaan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Askary et al., 2022).

Dalam sektor kesehatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan penting dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks. Penelitian mengenai penanganan stunting di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta tingkat partisipasi masyarakat (Dinarwati & Nurfadilah, 2025).

Penelitian mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru juga menekankan pentingnya penerapan model *collaborative governance* untuk mengintegrasikan peran berbagai aktor dalam penanganan masalah kesehatan yang bersifat multidimensional (Saputra et al., 2025). Selain itu, penelitian mengenai implementasi *Integrated Vector Management* dalam eliminasi malaria di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada integrasi peran dinas kesehatan, puskesmas, serta pemerintah desa dalam pengendalian vektor penyakit (Lewinsca, 2025).

Pada sektor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor juga menunjukkan peran yang signifikan. Penelitian mengenai program Kali Bersih di Kota Sorong menunjukkan bahwa program Prokasih menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran lingkungan melalui keterlibatan berbagai aktor lintas sektor (Sumarta et al., 2025). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemetaan pemangku kepentingan serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi lokal (Artha et al., 2023). Sementara itu, penelitian mengenai kesiapsiagaan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa pertukaran informasi dan koordinasi antar sektor menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana (Bustari et al., 2009).

Dalam sektor sosial dan perlindungan masyarakat, kolaborasi lintas sektor juga ditemukan dalam berbagai program kebijakan sosial. Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar lembaga serta struktur birokrasi yang jelas dalam proses implementasi kebijakan (Suciana et al., 2022). Penelitian mengenai program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan kolaboratif dapat mendorong terciptanya inklusi sosial dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (Melati & Asmorowati, 2023). Penelitian lain mengenai program BPNT di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa implementasi kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan (Salsabila et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif melalui integrasi layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin (Purwanto et al., 2013).

Temuan lain juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki peran penting dalam membangun partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Penelitian mengenai *participatory governance* di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan yang kuat dapat memperkuat sinergi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam implementasi kebijakan sosial (Yunus, 2022). Selain itu, penelitian mengenai pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak jalanan di Kota Semarang menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor kesehatan, sosial, dan komunitas masyarakat menjadi faktor penting dalam menangani permasalahan sosial yang kompleks (Rahma et al., 2021). Penelitian mengenai kebijakan pengawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah dapat memperkuat kerja sama diplomatik dan ekonomi dalam menekan aktivitas penyelundupan lintas negara (Rokhaniyah et al., 2023).

Secara umum, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah menjadi pendekatan penting dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan, serta kapasitas antar berbagai aktor sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

### 3.2 Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan yang semakin penting dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kompleksitas permasalahan pembangunan, seperti kemiskinan, kesehatan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan sosial, menuntut adanya kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang berbeda. Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi kerangka yang relevan dalam menjelaskan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola kolaborasi lintas sektor di Indonesia umumnya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat atau organisasi masyarakat sipil. Pola kerja sama tersebut mencerminkan model *multi-stakeholder collaboration* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam model ini, pemerintah

umumnya berperan sebagai koordinator utama yang menyediakan kerangka regulasi serta mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan.

Selain pemerintah, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan melalui kontribusi sumber daya finansial, teknologi, serta keahlian manajerial. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta masih cenderung terbatas pada aspek pendanaan program, sehingga peran strategis sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan kebijakan masih relatif terbatas. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting sebagai penerima manfaat kebijakan sekaligus sebagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi program pembangunan.

Meskipun demikian, praktik kolaborasi lintas sektor di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya ego sektoral antar lembaga yang seringkali menghambat proses koordinasi dan kerja sama antar organisasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang sistematis juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kolaboratif. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program kebijakan juga menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik masih perlu diperkuat dalam implementasi kebijakan berbasis kolaborasi.

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik. Melalui kerja sama antara berbagai aktor, program kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif karena adanya pembagian peran, integrasi sumber daya, serta pertukaran pengetahuan antar organisasi. Selain itu, pendekatan kolaboratif juga dapat mendorong terciptanya inovasi kebijakan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kerangka kelembagaan yang lebih inklusif, memperkuat kapasitas koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan publik.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 15 artikel yang relevan mengenai kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi strategi penting dalam mengatasi kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara mandiri. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, pengetahuan, serta kapasitas antar berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam proses implementasi kebijakan publik. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pola kolaborasi yang paling umum diterapkan adalah model *multi-stakeholder collaboration*, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil sebagai aktor utama, dengan dukungan aktor lain seperti akademisi dan media dalam memperkuat proses implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kolaborasi lintas sektor sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan antar aktor, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun demikian, berbagai tantangan masih ditemukan dalam praktik implementasinya, seperti ego sektoral antar lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pendekatan kolaboratif tetap memberikan implikasi positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik, khususnya dalam meningkatkan inovasi kebijakan, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi kebijakan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### Referensi

1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
2. Anwar, P., Alwi, N., Nara, N., & Susanti, G. (2023). Managing goal in collaborative management: A case study in policy implementation of MEMBARA in Central Mamuju Regency. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)*, 5(3).
3. Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1), 25–36.

4. Askary, Alwi, & Susanti, G. (2022). Collaborative innovation pada birokrasi publik di Kabupaten Mamuju Tengah: Studi kasus program MEMBARA. *Vox Populi*, 5(1), 53–60.
5. Bustari, A., Trisnantoro, L., & Hasanbasri, M. (2009). Kolaborasi lintas sektoral dalam kesiapsiagaan bencana banjir: Studi kasus di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(4), 184–192.
6. Dinarwati, S., & Nurfadilah, Y. M. (2025). Analisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program penanganan stunting di wilayah perdesaan (Studi terapan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang). *WPAJ (Public Administration Journal)*, 7(1), 1–7.
7. Hadi, S., & Nugraha, J. T. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 115–128.
8. Handayani, R., & Putra, M. (2022). Systematic literature review: Penggunaan media komik dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(1), 45–55.
9. Hidayat, T., & Rasyid, M. (2022). Analisis collaborative governance dalam kebijakan kesehatan daerah. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 34–43.
10. Iskandar, D., & Setiawan, H. (2021). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 55–66.
11. Lewinsa, M. Y. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam implementasi *Integrated Vector Management (IVM)* untuk eliminasi malaria: Studi kualitatif di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 10(1).
12. Maharudin, D. (2025). Good governance dalam pelayanan publik: *Systematic literature review* terhadap model dan best practices di berbagai negara. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 13(3), 1–11.
13. Maulidah, M., Paselle, E., & Putri, A. A. H. (2024). Collaborative governance dalam kebijakan penanganan stunting di Kota Samarinda. *Jurnal Perspektif*, 13(2), 356–364.
14. Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial: Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. *Jurnal Dharma Agung*, 31(3), 257–267.
15. Nasrulhaq. (2020). Nilai dasar collaborative governance dalam studi kebijakan publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395–402.
16. Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). *Systematic literature review*: Tata kelola kolaboratif dalam sektor publik. *Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 11(1), 1–22.
17. Rahma N., F., Shaluhiyah, Z., & Suryoputro, A. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan kesehatan reproduksi anak jalanan. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2), 334–343.
18. Rokhanyah, H., Noor, M. I. N., Harahap, A. M., Wijaya, B. S., & Amalia, N. R. (2023). Kolaborasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyelundupan di daerah perbatasan (Studi kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(4), 305–313.
19. Sakir, A. R. (2025). Hybrid governance dalam kebijakan publik: Studi tinjauan literatur sistematis tentang kolaborasi, tantangan, dan faktor keberhasilan. *Trajectories: Public Administration Journal*, 2(3), 276–289.
20. Salsabila, A., Priyanto, H., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis (Jurnal Administrasi Publik)*, 1(3), 14–25.
21. Saputra, T., Zuhdi, S., Meriansari, F., Sufi, W., & Eka. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS: Studi *collaborative governance* di Kota Pekanbaru. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2), 35–45.
22. Siburian, S. R., Kandias, M. I., & Ridho, H. (2024). Collaborative governance dalam penanganan ODGJ di Kota Medan. *Sajjana: Public Administration Review*.
23. Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat (Studi deskriptif di Desa Cipayang Kecamatan Cikarang Timur). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 326–336.
24. Sumarta, R. P., Hafita, Y. A., Widarbowo, D., Haryanto, D., & Idris, M. (2025). Kolaborasi lintas sektor dalam program Kali Bersih di Sorong: Penguatan kesadaran lingkungan dan kepedulian sosial. *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora*, 6(3), 27–33.
25. Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana*, 16(2).
26. Yunus, I. (2022). *Analisis participatory governance dalam kebijakan publik (Studi kasus: Institutional building pada implementasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah)* [Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin].